

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah salah satu kegiatan usaha yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta berperan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang demokratis. Koperasi masih sering dianggap sebagian kalangan sebagian badan usaha kelas dua di Indonesia. Padahal potensi dan kekuatan koperasi yang bersumber dari beranggotakan bisa menjadikan koperasi yang kokoh dalam menghadapi peningkatan ekonomi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun. Koperasi sebagai salah satu lembaga milik bangsa yang bergerak dibidang ekonomi. Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan lembaga ekonomi lainnya. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi akan menangani berbagai pihak, mengenai keuangan sehingga keadaan koperasi atau hasil kinerja koperasi sangat penting. Terkait dengan ini maka penting bagi koperasi untuk menyiapkan laporan keuangan (Purnamawati, 2020).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangannya. Entitas tanpa akuntabilitas merupakan perusahaan perbankan, entitas yang bukan merupakan perusahaan asuransi, entitas yang bukan merupakan perusahaan dana pensiun dan dana investasi lainnya. Menurut Martani & Zaelani (2011), entitas tanpa akuntabilitas publik menerbitkan laporan keuangannya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak dapat terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga kredit, contohnya entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM dan Koperasi. Laporan keuangan koperasi yang di jelaskan di dalam Peraturan Menteri KUKM No. 12 Tahun 2015, yaitu laporan perubahan ekuitas (modal), laporan arus kas. Sedangkan untuk koperasi yang bergerak di kegiatan Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 13 Tahun 2015, laporan keuangan koperasi meliputi: Neraca, laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan data KMKUKM No. 4 Tahun 2012 tentang Perkoprasian, SAK ETAP merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Badan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyatakan bahwa Dewan Standar

Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK) atas pencabutan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka dengan itu diberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Standar Akuntansi Koperasi adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan metode akuntansi yang digunakan oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. Tujuan dari Standar Akuntansi Koperasi adalah untuk menyediakan panduan yang konsisten dan terstandarisasi dalam merekam transaksi keuangan, mengukur kinerja keuangan, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi pemangku kepentingan koperasi (Purnamawati, 2020).

Laporan keuangan koperasi yang baik seharusnya mampu menyajikan informasi mengenai kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan seperti; dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Koperasi harus mampu mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal dimaksud,

pembenahan dalam koperasi haruslah dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari setiap pegawai, maupun peralatan pendukung seperti, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan (Sihombing, 2021).

Menurut Aulia & Hamdani (2020), kualitas koperasi yang bagus salah satunya bisa diamati melalui kualitas pelaporannya. Faktor yang mempunyai ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan yang kurang ialah suatu penyebab adanya kegiatan pengungkapan laporan yang masih dijadikan hambatan atau kendala (Maelani et al., 2021). Dalam hal penyajian laporan keuangan koperasi, ada beberapa prinsip dasar akuntansi yang harus dipenuhi, dan ada juga regulasi yang harus dipatuhi untuk penyajian laporan keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah bahwa laporan keuangan koperasi harus disajikan sesuai dengan SAK ETAP (Sinaga & Tarigan, 2021).

Pengelolaan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP penting dilakukan karena koperasi dituntut untuk memberikan informasi melalui pelaporan keuangan yang terpercaya dalam hal ini sesuai dengan SAK ETAP. Pengadaan standar akuntansi serta pemaparan laporan keuangan koperasi mempunyai tujuan memberi informasi akan suatu hal ke pihak anggotanya ataupun warga yang berkaitan dengan keadaan, kinerja serta perubahan letak keuangan yang mempunyai manfaat untuk penentuan kebijakan yang secara startegis guna melakukan atau mengembangkan suatu koperasi (Aulia & Hamdani, 2020). Jadi laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan SAK ETAP mencerminkan

adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan koperasi. SAK ETAP disusun untuk memberikan kerangka kerja yang sederhana dan relevan bagi entitas kecil seperti koperasi simpan pinjam. Namun, keberhasilan penerapan SAK ETAP dalam koperasi simpan pinjam tidak dapat dijamin hanya dengan keberadaan standar tersebut. Implementasi SAK ETAP dan pemahaman terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di dalam koperasi simpan pinjam akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Implementasi SAK ETAP mengacu pada sejauh mana koperasi simpan pinjam menerapkan SAK ETAP dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangannya. Implementasi yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi anggota koperasi, pengurus, dan pihak eksternal lainnya. Implementasi SAK ETAP dipengaruhi oleh pemahaman yang baik tentang SAK ETAP di antara anggota koperasi, pengurus, dan staf yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Semakin baik pemahaman mereka tentang standar ini, semakin besar kemungkinan mereka dapat mengimplementasikannya dengan benar (Anisykurlillah & Rezqika, 2019).

Terkait implementasi SAK ETAP koperasi harus menerapkan prosedur akuntansi sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Proses pencatatan transaksi, pengukuran aset dan kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang dijelaskan dalam standar tersebut. SAK ETAP disusun khusus untuk entitas kecil seperti koperasi simpan pinjam,

sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha koperasi tersebut. Pengurus koperasi harus memahami bagaimana mengadaptasi standar tersebut agar sesuai dengan kondisi koperasi. Untuk meningkatkan implementasi SAK ETAP, koperasi perlu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota dan staf tentang SAK ETAP serta berbagai perubahan atau pembaruan yang terkait. Peningkatan kompetensi akan membantu anggota koperasi dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi pada standar tersebut. Penting bagi pengurus dan anggota koperasi untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan SAK ETAP. Komitmen ini akan mendorong usaha bersama untuk mencapai kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik (Huvat, 2017).

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah proses di mana entitas yang termasuk dalam kategori entitas tanpa akuntabilitas publik, seperti koperasi, yayasan, dan UKM, menerapkan dan menjalankan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK) dalam menyusun laporan keuangannya. Tujuan utama implementasi SAK ETAP adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan transparan agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti anggota koperasi, pengurus, pemegang saham, kreditur, dan pihak berwenang, dalam mengambil keputusan, mengevaluasi kinerja keuangan, dan memahami kondisi keuangan entitas. Implementasi SAK ETAP memungkinkan koperasi untuk menyesuaikan praktik akuntansi mereka dengan karakteristik unik koperasi, seperti struktur

kepemilikan yang demokratis, orientasi berdasarkan anggota, dan tujuan ekonomi bersama. SAK ETAP memberikan kerangka kerja yang mempertimbangkan aspek-aspek ini. SAK ETAP memuat prinsip akuntansi yang relevan dan sesuai dengan kegiatan koperasi, seperti pembagian laba kepada anggota, penentuan sisa hasil usaha, dan penilaian kembali aset. Implementasi SAK ETAP mendorong koperasi untuk mencatat transaksi mereka dengan benar dan memastikan pengungkapan informasi yang akurat dalam laporan keuangan. Hal ini membantu anggota dan pemangku kepentingan dalam memahami kondisi keuangan koperasi (Rahmawati & Puspasari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2018) membuktikan bahwa implementasi SAK ETAP memiliki pengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Tingkat implementasi ini mencerminkan sejauh mana koperasi menerapkan SAK ETAP dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangannya. Implementasi yang tinggi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi. Ketika koperasi menerapkan SAK ETAP dengan benar, laporan keuangan akan lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja operasional koperasi secara obyektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017) memberikan hasil yang sejalan yang kemudian semakin mendukung bahwa tingkat implementasi memiliki pengaruh terhadap SAK ETAP.

Anggota serta pengurus memiliki peranan dalam tingkat implementasi SAK ETAP dalam koperasi. Selain itu, persepsi anggota koperasi terhadap SAK ETAP juga memegang peranan penting dalam proses pelaporan keuangan. Pemahaman yang baik akan mendorong anggota koperasi untuk menghargai dan memahami informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar tersebut. Sebaliknya, persepsi yang negatif atau kurang mengerti mengenai SAK ETAP dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar. Anggota koperasi yang memahami SAK ETAP akan lebih mudah memahami informasi keuangan yang terdapat dalam laporan. Mereka akan mengerti bagaimana informasi tersebut disajikan, termasuk cara pengukuran, presentasi, dan pengungkapan informasi keuangan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis kinerja koperasi dan mengambil keputusan yang tepat (Narsa & Isnalita, 2017).

Temuan yang diperoleh, SAK ETAP belum banyak dipahami oleh para pengurus koperasi sehingga penyusunan laporan keuangan koperasi masih belum sesuai standar keuangan. Hasil ini ditemukan oleh Arma Yuliza (2016) yang menemukan belum diterapkannya SAK ETAP di Koperasi Universitas Pasir Pengaraian. Hasil yang sama ditemukan oleh Setyaningsih (2014) yang meneliti di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Makmur Batang belum sesuai SAK ETAP. Djumiko, dkk, (2013) dalam Aulia & Hamdani (2020) menemukan pemahaman pengurus terhadap SAK ETAP sehingga penerapannya dikategorikan sangat rendah. Adapun penelitian lain yang mendukung terkait Implementasi SAK ETAP yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Aulia & Hamdani (2020) menunjukkan bahwa Implementasi SAK ETAP positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi di Kota Tangerang.

Persepsi positif terhadap SAK ETAP akan meningkatkan tingkat kepercayaan anggota koperasi terhadap kualitas dan transparansi laporan keuangan. Mereka akan merasa yakin bahwa laporan keuangan disusun dengan standar yang sesuai dan tidak terdapat manipulasi atau kesalahan yang merugikan. Anggota koperasi yang memahami SAK ETAP akan cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kondisi keuangan dan operasional koperasi. Mereka akan menggunakan informasi keuangan yang ada untuk memberikan masukan dan memahami implikasi dari keputusan yang diambil (Divianto & Febrianty, 2017).

Hal ini serupa dengan kondisi koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya di daerah Buleleng telah mengalami perkembangan termasuk koperasi di wilayah Kecamatan Buleleng. Mayoritas koperasi di Kecamatan Buleleng sudah memiliki Unit Simpan Pinjam, Namun sebagian besar koperasi belum menerapkan SAK ETAP. Sedangkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi harus menerapkan keuangan berbasis SAK ETAP. Kinerja Koperasi yang dilakukan tersebut untuk membantu kebutuhan usaha Masyarakat dan UMKM. Sehingga segala usaha masyarakat di kawasan Buleleng dapat berjalan dengan baik. Seluruh Koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng memberikan pelayanan dan proses

peminjaman yang lebih mudah, sehingga masyarakat pada umumnya lebih sering menggunakan jasa Koperasi dibandingkan dengan jasa Bank jika peminjamannya lebih kecil.

Berdasarkan rekapitulasi data koperasi per 31 desember 2022 dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa data atau nama koperasi yang aktif di Buleleng berjumlah 330 koperasi, dan ada juga beberapa koperasi yang tidak aktif berjumlah 81 Koperasi. Sedangkan data dari wawancara langsung koperasi di Kecamatan Buleleng ada beberapa faktor ketidakaktifan koperasi yaitu mayoritas tidak memiliki modal besar untuk menjalankan sistem koperasi, yang kedua tidak koperaktifnya nasabah dalam membayar angsuran. Berdasarkan data dinas koperasi Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa masih banyak koperasi yang belum bisa menerapkan laporan keuangan dalam aturan SAK ETAP. Adapun dampak tidak diterapkannya aturan SAK ETAP adalah peminjaman dana dipihak eksternal seperti bank atau perusahaan finansial lainnya tidak bisa 100% penuh, Akan tetapi jika koperasi tersebut bisa menerapkan SAK ETAP maka akan mendapat keuntungan kemudahan persiapan laporan keuangan, mendapat pinjaman dan lebih besar, dapat digunakan dalam beberapa tahun kedepan. Koperasi di Kecamatan Buleleng tidak menerapkan SAK ETAP karena minimnya sosialisasi SAK ETAP, anggapan bahwa SAK ETAP tidak efektif, butuh dana untuk mendapatkan karyawan yang terlatih. Adapun faktor yang diduga mempengaruhi persepsi terhadap implementasi SAK ETAP yaitu kompetensi sumber daya manusia. Masih banyak pegawai yang berlatar belakang

pendidikan non akuntansi, masa tugas pekerjaan saat bekerja masih kurang lama serta kurangnya pemberian informasi dan sosialisasi dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM. Maka dari itu banyak pihak dari koperasi memilih untuk menjalankan program masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan dengan mudah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dicantumkan mengenai topik pengelolaan keuangan berbasis SAK ETAP yang diangkat serta digunakan sebagai pertimbangan. penelitian Candra (2018) yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Kpn Serumpun Dinas pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Mengemukakan bahwa pada koperasi tersebut didalam menyajikan pelaporan keuangannya masih ada ketidaksesuaian akan kaidah atau pedoman dalam menyajikan laporannya berdasar SAK ETAP. Beberapa hal yang mengakibatkan koperasi ini mempunyai hal yang masih kurang didalam penyajian pelaporan keuangan didasarkan pada SAK ETAP ialah dikarenakan masih minim adanya sebuah pengetahuan terkait dengan SAK ETAP serta kesadaran yang masih kurang juga oleh suatu manajemen terhadap laporan keuangan yang amat penting.

Sementara penelitian Ikhsan (2018) yang berjudul Analisa dalam menerapkan SAK ETAP didalam Menyusun laporan didalam koperasi simpan pinjam atas cabang pinrang menyatakan bahwa menerapkan SAK ETAP di KSP yang dikarenakan cabang pinrang. Sudah terlaksana, akan tetapi masih kurangnya keefektifan karen hanyalah melakukan penerapan serta mengerjakan laporan kegiatan neraca serta hanya laba rugi saja. Kemudian kegiatan ruangan

lingkup terkait dengan pelaporan keuangan SAK ETAP yakni meliputi beberapa hal misalnya neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas serta CALK yang tidak dibuat serta disesuaikan atas pedoman SAK ETAP. Penelitian Rahmany (2019) yang berjudul Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada KPRI Di Kabupaten Sumenep). Menegaskan bahwasannya KPRI di Sumenep telah mengadakan catatan akuntansi serta melakukan penyusunan laporan dengan diadakannya pencatatan yang sederhana serta tidak berpedoman dalam standar akuntansi yang diberlakukan atau yang menguasai SAK ETAP tersebut.

Dari penelitian terdahulu dapat diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai implementasi SAK ETAP pada koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng yang masih dalam proses pengembangan. Berdasarkan hasil pra observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti memperoleh data dan informasi yang menunjukkan adanya suatu fenomena atau permasalahan sesuai dengan judul penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di koperasi simpan pinjam Kecamatan Buleleng. Selain itu, hasil dari riset terdahulu terkait implementasi SAK ETAP terbilang masih minim digunakan sehingga mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Mengingat faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SAK ETAP. Keberadaan koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam struktur ekonomi, maka diperlukan administrasi dan proses pembukuan yang baik. Informasi keuangan

koperasi dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan koperasi yang terdapat perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Pada perkembangannya, permasalahan umum pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu masalah modal dan kompetensi pengurus saat menyelesaikan laporan keuangan yang relatif masih rendah (Prihantini & Purnamawati, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji atau meneliti mengenai Implementasi SAK ETAP. Sehingga peneliti memformulasikan judul **“Pengaruh Implementasi SAK ETAP dan Pemahaman Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebagaimana koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng belum menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
- 2) Terdapat inkonsistensi dan minimnya hasil penelitian terdahulu terhadap variabel yang sama dengan penelitian ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang digunakan yaitu Implementasi SAK ETAP dan Pemahaman serta Kualitas Penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah implementasi SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng?
- 2) Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh implementasi SAK ETAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi.

- b. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat pada bangku kuliah dengan penerapannya yang sebenarnya di lapangan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
- d. Penelitian ini dilakukan untuk menguji teori yang digunakan dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak berikut ini.

- a. Bagi Peneliti (selaku mahasiswa Akuntansi program S1), Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai implementasi dan pemahaman terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.
- b. Bagi Tempat Penelitian, Penelitian ini dapat memberikan informasi maupun masukan yang bermanfaat bagi Koperasi di Kecamatan Buleleng terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas penyajian laporan yang dihasilkan demi untuk memajukan koperasi.